

Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Tira Nadia¹, Dedi Kusuma Habibie²

^{1,2} Administrasi Publik, FISIP Universitas Riau

e-mail: tira.nadia1505@student.unri.ac.id¹, dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi serta hambatan bagi pemerintah daerah dalam hal mengatasi bencana abrasi di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pertama keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kurang dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga terjadinya abrasi dan partisipasi penanggulangan bencana abrasi. Konsep digunakan dalam penelitian ini adalah konsep implemtasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, indikator ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang diperoleh melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengatasi abrasi, implementasi yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai mampu mencegah terjadinya bencana abrasi, walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan strategi ini nantinya seperti keterbatasan anggaran akibatnya tidak berjalannya pembangunan penanggulangan yang telah direncanakan dan kebutuhan masyarakat saat terjadinya bencana abrasi.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemerintah Daerah, Penanggulangan*

Abstract

Implementation is an implementation or application made to achieve a goal. The aim of this research is to determine the implementation and obstacles for local governments in overcoming the abrasion disaster in Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency. The problems in this research are: first, limited budget and lack of human resources and awareness of the community itself to prevent abrasion and participation in abrasion disaster management. The concept used in this research is the concept of policy implementation proposed by George C. Edward III, this indicator includes communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative descriptive research method, data obtained through interviews, observation and documentation. From the research results, it can be seen that the implementation assisted by the Indragiri Hilir Regency Regional Disaster Management Agency to overcome abrasion, the implementation that has been determined by the Indragiri Hilir Regency Regional Disaster Management Agency is considered capable of preventing abrasion disasters, although there are still several obstacles in the implementation of this strategy in the future, such as Budget limitations result in the planned development of countermeasures and community needs not taking place when an abrasion disaster occurs.

Keywords: *Implementation, Regional Government, Management*

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Parit" karena daerah yang dikelilingi perairan, sungai, rawa rawa dan perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan parit. selain itu Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai 20 kecamatan, yaitu Keritang, Kemuning, Reteh, Sungai Batang, Enok, Tanah

Merah, Kuala Indragiri, Concong, Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka, Gaung, Mandah, Kateman, Pelangiran, Teluk Belengkong dan Pulau Burung. Semua kecamatan terletak di perairan sungai. Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan daerah yang rawan terhadap bencana atau kawasan yang sering mengalami bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, longsor atau abrasi, gelombang pasang dan angin puting beliung.

Bencana alam pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh manusia, Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Alam, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Indragiri Hilir sering mengalami bencana abrasi, dimana kondisi geologis tanah di Indragiri Hilir yang rata-rata terdiri dari tanah lempung yang lunak yang berpotensi ancaman runtutan tanah disejumlah wilayah pesisir pantai. Bencana abrasi merupakan kejadian alam yang berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai, yang dikibatkan oleh ombak dan arus yang bersifat merusak, yang disesabkan oleh permukaan air laut yang naik dan juga dikarenakan psang surutnya air sungai yang begitu kuat yang dapat mengikis permukaan tanah sehingga tanah tidak lagi mampu menahan beban yang diatasnya. Ombak dan arus yang di sebabkan terjadi karena lajunya transportasi laut seperti kapal, speedbot, dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, pada Pasal 8 ayat (2) pada bagian (b) yaitu bahwa pada daerah Kabupaten Indragiri Hilir sudah memberikan surat persetujuan berlayar berbagai jenis kapal.

Bencana abrasi sering kali menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terutama masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai. Jarak rumah warga dengan sungai yang telalu dekat mejadi faktor utama yang mengakibatkan terjadinya abrasi. Sebagian warga sudah mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadinya abrasi yang datang secara tiba-tiba, sebagian juga ada yang belum mengetahui cara untuk menyelamatkan diri. Warga yang telah banyak mengetahui tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana abrasi, mereka akan mengungsi barang barang mereka dan menyelamatkan diri mereka dengan mengungsi kerumah kerabat yang jauh dari bantaran sungai. Bencana abrasi yang datang secara tiba-tiba dapat mengakibatkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini adalah dengan penanggulangan dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana.

Kecamatan Tanah Merah merupakan daerah pasang surut, Daerah aliran sungai (DAS) abrasi ini diantara sungai dan lautan, abrasi ini terjadi di daerah lengkungan belokan sungai atau disebut dengan tanjung. Dengan kondisi demikian, telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai amanah dan sebagai pelayan masyarakat untuk mengetahui serta berupaya mengantisipasi gejala-gejala bencana dan bukan hanya beegerak setelah kejadian. Kondisi ini juga dapat memberikan konsekuensi yang bisa menjadi kendala atau tantangan bagi masyarakat sekitar sungai. keberadaan sungai tidak hanya memberikan berbagai fungsi tetapi juga sebagai sumber kejadian bencana.

Bencana abrasi ini menjadi suatu perhatian bagi peneliti untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya abrasi dan bagaimana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangannya. Karena hal tersebut menjadi suatu bencana yang perlu ditangani dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkapkan secara pasti apa yang mengakibatkan sehingga terjadi secara terus menerus bencana abrasi ini, dan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan bencana alam khususnya pada bencana abrasi.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana alam pada pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di daerah dibawah koordinasi dan komando BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan

bencana daerah, badan lingkungan hidup, dan badan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Alam, pada pasal 39 ayat (1) berbunyi bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasi, longsor, ambles, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, kepunahan jenis tumbuhan atau satwa dan wabah penyakit. Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir ini mengatakan bahwa longsor itu adalah abrasi, karena longsor yang terjadi di daerah Kecamatan Tanah Merah ini adalah longsor dibawah laut atau sungai.

Kecamatan Tanah Merah adalah Kecamatan yang terletak di pesisir sungai Indragiri Hilir, dimana pemukiman atau tempat tinggal masyarakat berada di tepian atau pinggiran sungai. Kecamatan Tanah Merah memiliki luas daerah -721,56km² dengan jumlah penduduk -35.679 jiwa. Di Kecamatan Tanah Merah terdapat 10 desa antara lain : desa Tanah Merah, desa Tanjung pasir, desa Tanjung Baru, desa Sungai Laut, desa Sungai Udang, desa Sungai Nior, desa Selat Nama, desa Tekulai Hilir, desa Tekulai Bugis, desa Tekulai Hulu. Adapun desa yang rentan terkena bencana abrasi adalah desa Tanah Merah Kelurahan Kuala Enok dan desa Tanjung Pasir.

Di Kecamatan Tanah Merah longsor yang terjadi adalah longsor bawah laut atau disebut dengan abrasi. Nama sungai yang ada di Kecamatan Tanah Merah yaitu, sungai niur, sungai laut, sungai perigi, dan sungai enok. Adapaun yang sering terdampak abrasi adalah sungai perigi dan sungai enok yang merupakan pemisah antara Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah. Disepanjang sisi-sisi sungai dipenuhi pemukiman warga dan termasuk sentra aktifitas nelayan di kedua sisi sungai ini. Kedalaman sungai perigi dan sungai enok ini ± 70 meter dari atas permukaan sungai, dan sungai perigi dan sungai enok ini termasuk kedalam kategori sungai yang dalam dan besar.

Penyebab terjadinya abrasi di Kecamatan Tanah Merah dikarenakan pasang surutnya air sungai, dan disebabkan oleh arus sungai yang begitu deras atau kuat yang mengikis permukaan tanah sehingga tanah tidak lagi mampu menahan beban yang ada di atasnya. Sebagai pelaksana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana abrasi baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. dalam implementasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir menjadi leading sector yang menjadi penggerak dalam penanggulangan bencana yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Sosial, PMI (Palang Merah Indonesia), BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis.

Kapasitas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir melibatkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi serta tanggap darurat atau saat terjadinya bencana untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak bencana abrasi. Sedangkan pada pascabencana melibatkan beberapa stakeholder yang terkait buktinya nyata nya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Indragiri Hilir dan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Namun yang terjadi dari pihak pemerintah daerah tidak adanya tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dilakukan untuk penanggulangan bencana abrasi ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir di Jalan Swarna Bumi, Tembilihan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu lokasi

penelitian selanjutnya adalah di Kecamatan Tanah Merah, dimana Kecamatan Tanah Merah ini merupakan lokasi yang sering terjadinya tanah longsor. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ambok Assek, S.Sos.,M.Si selaku Camat Tanah Merah, R. Arliansah, S.Si., ME selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Rahmad Hadi, S.H., MH selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Rismanto, S.Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Surya Negara (mewakili kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi) selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Yanumawartis selaku Dinas Sosial (Bidang Pelayanan Bantuan Sosial bagi korban bencana alam dan non alam), Yusnaldi, ST.,MM selaku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir (Bagian Bidang Kawasan Permukiman), Riyanto Musri, SE, MH selaku Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Bagian Kepala Seksi Lalu Lintas), Hj. Murnisyah, SE.,MH selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir (Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan), dan Heriyanto, Baharuddin, Jani, Darmi selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir (Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) serta Nursiah Sitompul, Amd Keb selaku Bidang Kesehatan (khususnya di Kecamatan Tanah Merah). Data primer didapatkan melalui narasumber berupa dokumentasi observasi dilapangan dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Data yang didapatkan bersumber dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Camat Tanah Merah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator yang penting dalam hal mempengaruhi implementasi , proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penanggulangan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan yang sedang diimplementasikan, implementor dalam hal ini adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir dan instansi yang terkait, sebagai pihak yang mengimplementasikan penanggulangan bencana dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan kerja sama sekaligus pihak yang terlibat dilapangan dan proses implementasi penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berikut merupakan hasil wawancara langsung yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan untuk mengetahui implementasi penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Tanah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

“Kita dari pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, komunikasi yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pencegahan kepada masyarakat dengan membuat mitigasi bencana, jika terjadi bencana ini lah yang kita lakukan yaitu cara kita menanggulangi sedini mungkin dengan cara sosialisasi kepada masyarakat bahwa bencana ini adalah milik kita bersama bukan hanya milik pemerintah saja”. (Wawancara dengan Bapak Rahmad Hadi, S.H, MH Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, Pada tanggal 22 Febuari 2024 Pukul 10.00 WIB).

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi juga dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, sumber daya yang di maksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang akan mempengaruhi jalannya suatu implemementasi kebijakan.

“Untuk sumber daya manusia sudah tersedia di BPBD Kabupaten Indragiri Hilir ini, untuk di lapangan ada TRC (Tim Reaksi Cepat) yang bertugas 24 jam siapsiagaan untuk urusan kebencanaan. Jumlah sumber daya manusia sekitar 45 orang, jika di bilang cukup itu tidak cukup tetapi untuk kondisi sekarang ini cukup” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir oleh Bapak Rahmad Hadi S.H, MH pada hari kamis 22, Februari 2024 pukul 10.00 WIB).

“Ada beberapa sumber anggaran termasuk untuk dana masyarakat yang bisa di peroleh, terutama dari pupr provinsi itu melalui bantuan keuangan, pihak, kemudian dana yang di peroleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) dan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn)”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Indragiri Hilir oleh Bapak Rismanto S.Sos pada tanggal 22 februari 2024 pukul 11.15 WIB)

“Untuk sarana dan prasarana di BPBD ini dalam bencana abrasi ini masih banyak yang kurang, namun untuk bencana abrasi ini BPBD memiliki sudah memiliki sebuah seedboat untuk langsung ke lokasi terjadinya bencana abrasi khususnya di Kecamatan Tanah Merah”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik oleh Bapak Rismanto S.Sos pada hari kamis 22 februari 2024 pukul 11.15 WIB).

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana sangat memberikan pengaruh dalam sebuah proses implementasi. Jika sikap implementor atau aktor pelaksana dalam sebuah implementasi memiliki sikap yang baik dalam menjalankan tugas dan patuh pada arahan serta isi dari kebijakan maka implementasi akan berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya jika sikap para implementor dalam menjalankan tugas kurang baik maka implementasi akan terganggu dan terhambat serta akan mengalami keterlambatan keberhasilan.

“Sikap pelaksanaan dalam penanggulangan bencana abrasi ini mereka konsen dalam melakukan dan menjalankan tugas. Disiplin pegawai juga bagus karena memberikan pelayanan dan turun kelapangan”. (Wawancara Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD oleh Bapak Rahmad Hadi S.H, MH pada hari kamis 22 februari 2024 pukul 10.00 WIB)

d. Struktur Birokrasi

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bersama dengan lembaga dan instansi yang terkait merupakan bentuk dari unit pelaksana yang bisa memiliki peran penting dalam kegiatan penanggulangan bencana yaitu disebut dengan pentahelix. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara sebagai berikut :

“Mengenai mekanisme pelaksanaan itu sangat baik karena kami juga sudah mengikuti sesuai tugas dan fungsi, dan kami juga sudah mengikuti mekanisme yang sesuai dengan SOP yang sudah diberikan”. (Wawancara Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan oleh Bapak Rahmad Hadi, S.H, MH)

Faktor Penghambat Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

a. Anggaran

BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sendiri memiliki beberapa sumber anggaran, anggaran ini lah yang dipakai oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penanggulangan bencana abrasi. Anggaran yang dipakai ini mulai dari tahap pra bencana hingga pasca bencana. dan di sinilah BPBD Kabupaten Indragiri Hilir berusaha memaksimalkan mungkin untuk memakai anggaran yang ada dengan bencana abrasi yang rutin terjadi .

Akan tetapi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir tidak transparansi menyebutkan anggaran yang digunakan khususnya penanggulangan bencana abrasi . sesuai dengan wawancara sebagai berikut :

“Kalau anggaran kita tidak bisa menyebutkan berapa nominalnya, anggaran itu tergantung berapa kebutuhan kita disini. Tergantung berapa banyak disiapkan oleh pemerintah

daerah". (Wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik oleh Bapak Rismanto S.Sos pada kamis 22 februari 2024 pukul 11.15 WIB)

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat lepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting untuk melaksanakan sebuah tujuan. Sumber daya manusia yang lengkap dan berkualitas maka pelaksanaan penanggulangan bencana abrasi akan terlaksana secara maksimal. Hal ini sudah menjadi faktor hambatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir . sesuai dengan wawancara sebagai berikut :

"Kami memiliki faktor yang menghambat dalam menjalankan implementasi penanggulangan bencana dan termasuk didalamnya keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), kami kekurangan anggota, anggota kami hanya berfokus di daerah pusat kabupaten, yang jauh dari luar kabupaten belum ada penempatan oleh BPBD itu sendiri, namun kami sudah memiliki rencana kedepannya untuk penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) disemua bidang". (Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir oleh Bapak R.Ariansah, S.Si,ME)

SIMPULAN

Analisis dan deskripsi dari fenomena terhadap fokus dalam penelitian Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu menjelaskan komunikasi yang terjadi antar badan pelaksana, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana. Disposisi atau sikap dari pelaksana dalam kepatuhan menjalankan Implementasi Penanggulangan Bencana Abrasi dan yang terakhir struktur birokrasi yaitu karakteristik dari badan pelaksana yang mencukupi kewenangan dan pola birokrasi dari badan pelaksana yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Maka dalam bab ini ditarik kesimpulan yaitu Implementasi penanggulangan bencana abrasi di Kecamatan Tanah Merah Indragiri Hilir belum berjalan secara maksimal serta di temukan beberapa kendala dan faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Dan juga masih kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga terjadinya abrasi dan untuk penanggulangan bencana abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik : Handbook Analisis Kebijakan Publik*. NUSAMEDIA.
- Harijoko, A., Puspitasari, D., Prabaningrum, I., Prastika, K. p., & Wijayanti, N. (2021). *Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, R. (n.d.). Upaya Pemerintah kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Kasus Pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012). *JOM FISIP*, Volume 1 Nomor 2 1-16.
- Kertati, I., Harsoyo, Pratomo, S., Sancono, B. A., Daeni, M., Widyastomo, R. P., et al. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (Dari Hulu ke Hilir)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniasih, S. (2023). *Seri Fenomena Alam dan Mitigasi Abrasi*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Londok, C. I. (2014). implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *JURNAL ADMINISRTASI PUBLIK*, Volume II.
- Mulyawati, C. (2021). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sumedang.
- Mustari, N. (2013). *implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris*. Membumi Publishing.

- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik : Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjar Masin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- setyowati, A. C., & Suryaningsih, M. (2017). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS : Journal Of Public Policy and Administration Silampari*, Volume 1-40.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv Sah Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press.
- Kadji, Y. (2018). *Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi*. Gorontalo : UNG Press
- Winarni. (2021). *Buku Pintar Penanggulangan Abrasi*. Yogyakarta : DIVA Press
- Wibowo, E. A., & Satispi, E. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- Yanti, T. (2021). Manajemen Bencana di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Pencegahan Abrasi Di Kecamatan Tanah Merah). *JOM FISIP*, Volume 8, Nomor 1-15.